

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH
DI KABUPATEN POHuwATO**

Oleh

**FATMA YUSUF
E21.19.268**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH
DI KABUPATEN POHuwATO

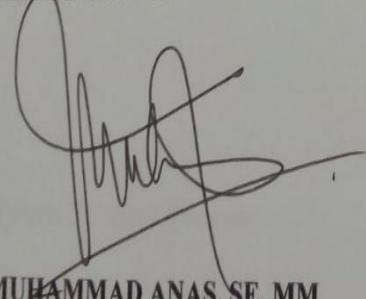
Oleh

FATMA YUSUF
E21.19.268

SKRIPSI

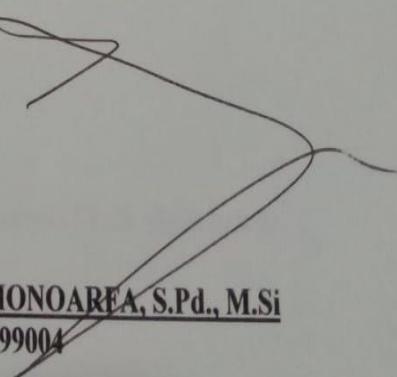
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dan Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal
Gorontalo, 11 November 2021

PEMBIMBING I



MUHAMMAD ANAS, SE.,MM
NIDN : 0920057402

PEMBIMBING II



SULERSKI MONOAREA, S.Pd., M.Si
NIDN : 0921099004

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH
DI KABUPATEN POHuwATO**

Oleh

**FATMA YUSUF
E21.19.268**

Diperiksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. Tamsir, SE., MM : 
2. Ng Syamsiah. B, SE., MM : 
3. Haris Hasan, SE., MM : 
4. Muhammad Anas, SE., MM : 
5. Sulerski Monoarfa, S.Pd, M.Si : 

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi



Ketua Program Studi Manajemen



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 11 November 2021

Y:  yataan

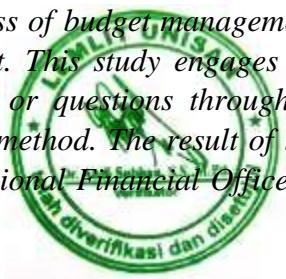


Fatma Yusuf
E21.19.268

ABSTRACT

YUSUF FATMA. E2119268. THE ANALYSIS OF BUDGET MANAGEMENT EFFECTIVENESS IN THE REGIONAL FINANCIAL OFFICE IN POHuwato DISTRICT

Effectiveness in budget management is the initial plan to start an organization. This study aims to discover and analyze the effectiveness of budget management at the Regional Financial Office in Pohuwato District. This study engages 35 respondents as a sample who respond to statements or questions through a questionnaire. This study uses the percentage analysis method. The result of the study indicates that the budget management at the Regional Financial Office in Pohuwato District has been effective.



Keywords: effectiveness, budget management

ABSTRAK

FATMA YUSUF. E2119268. ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN POHuwATO

Efektivitas dalam pengelolaan anggaran yang merupakan rencana awal untuk memulai suatu organisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pengelolaan anggaran pada Badan Keuangan di Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini melibatkan 35 responden sebagai sampel yang merespon dari pernyataan atau pertanyaan yang diajukan melalui koesioner. Penelitian ini menggunakan metode analisis persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Pohuwato sudah efektif.

Kata kunci: efektivitas, pengelolaan anggaran



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Ketika kamu berhenti memikirkan apa yang orang lain pikirkan, maka kamu dapat melangkah lebih jauh daripada yang kamu inginkan.

(Nindita)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmu lah tenpatmu berharap”

(Qs. Al-Insyirah :6-8)

(Fatma Yusuf)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

Kedua Orang Tuaku, yang telah memberikan dukungan, do'a, dan motivasi hingga saat ini. Terima kasih juga kepada kerabat, sahabat, serta yang terkasih yang selalu ada dikala suka maupun duka.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya

Aamiin yaa Robbal Alaamiin.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Pohuwato”**, sesuai dengan yang direncanakan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.Ak., CSRS selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Abdul Gafar Ladjokke, M,Si, selaku Rektor Universitas Gorontalo. Bapak Dr.. Musafir, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Syamsul, SE, M.Si, Selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Muhammad Anas, SE, MM, selaku Pembimbing I, dan Bapak Sulski Monoarfa, S.Pd., M.Si, selaku pembimbing II, yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Bapak Iskandar Datau, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato

Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga yang telah membantu dan mendukung saya serta dosen dan staf administrasi Universitas Ichsan Gorontalo dan rekan-rekan seperjuangan mahasiswa manajemen yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semua yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Saran dan kritik, penulis harapkan dari semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang bekepentingan.

Gorontalo, November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	4
1.3.1. Maksud Penelitian	4
1.3.2. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Efektivitas.....	6
2.1.1. Pengertian Efektivitas	
2.1.2. Kriteria Pencapaian Tujuan Efektif Atau Tidak	8

2.1.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas	10
2.1.4. Efektivitas Anggaran	12
2.2. Anggaran	12
2.2.1. Pengertian Anggaran	12
2.2.2. Tahapan dan Aspek Pengelolaan Anggaran.....	14
2.2.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	16
2.2.4. Jenis-Jenis Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah	17
2.2.5. Unsur-unsur APBD.....	18
2.2.6. Landasan Hukum APBD.....	18
2.2.7. Fungsi APBD	18
2.2.8. Tujuan APBD	20
2.3. Kerangka Pikir	21
2.4. Hipotesis.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
3.1. Obyek Penelitian.....	22
3.2. Metode Penelitian	22
3.2.1. Desain Penelitian	22
3.2.2. Variabel Penelitian	22
3.2.3. Definisi Operasionalisasi Variabel	23
3.3. Metode Pengumpulan Data	24
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	24
3.5. Populasi	25
3.6. Metode Analisis	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	27
4.1.1. Sejarah BKD Kabupaten Pohuwato	27
4.1.2. Perkembangan BKD Kabupaten Pohuwato.....	30
4.1.3. Struktur Organisasi.....	31
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	32

4.2.1. Hasil Penelitian	32
4.2.2. Pembahasan.....	37
BAB V KESIMPULAN DAN SASARAN	40
5.1. Kesimpulan	40
5.2. Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	41
JADWAL PENELITIAN.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel.....	23
Tabel 3.2 Skor Alternatif skala Likert.....	24
Tabel 3.3 Skala Likert	27
Tabel 3.4 Rentang Skala Pengukuran Terhadap Skor Item	27
Tabel 4.1 Rentang Skala Pengukuran Terhadap Skor Item	32
Tabel 4.2 Tanggapan Responden Pada Kontribusi Sumber Daya Manusia Dalam Penyusunan Anggaran Sesuai Dengan Kompetensinyadi Antaranya Menentukan Seberapa Besar Biaya Yang Dibutuhkan	33
Tabel 4.3 Tanggapan Responden Tentang diterapkannya Informasi Kebijakan Penyusuna Perencanaan Anggaran Sesuai Dengan Visi Dan Misi Pemerintah.....	34
Tabel 4.4 Tanggapan Responden Tentang Kebijakan Anggaran Berupa Program Dan Kegiatan Telah Sesuai Tujuan Pemerintah Dan Dialokasikan Berdasarkan Pendanaannya Yang berorientasi Pada Tujuan Yang Hendak Dicapai.....	34
Tabel 4.5 Tanggapan Responden Tentang Telah Digunakannya Anggaran Untuk Memfasilitasi Kegiatan Ekonomi Masyarakat Sehingga Dapat Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	35
Tabel 4.6 Tanggapan Responden Tentang Kebijakan Dari Pimpinan Dalam Hal Pelaksanaan Anggaran Berupa Program Dan Kegiatan Sesuai Hasil Kesepakatan Para Sumber Daya Manusia Yang Terlibat di dalamnya	36

Tabel 4.7 Tanggapan Responden Penerapan Kegiatan Pelaksanaan Anggaran Berdasarkan Penyusunan Perencanaan Anggaran Sesuai Dengan Komitmen Yang Ada Dalam Visi Dan Misi Pemerintah	37
Tabel 4.8 Rekapitulasi Hasil Analisis Deskriptif Tanggapan Responden	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	21
Gambar 4.1 Gambar Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato.....	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian	43
Lampiran 2 Kuisioner	44
Lampiran 3 Tabulasi Data	46
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian	47
Lampiran 5 Surat Balasan Lokasi Penelitian	48
Lampiran 6 Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi	49
Lampiran 7 Hasil turnitin	50
Lampiran 8 Curriculum Vitae	51

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya organisasi dibangun dengan maksud agar aktivitas yang dilakukan dapat terarah karena direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan. Aktivitas suatu organisasi terkontrol dengan baik yang dilaksanakan oleh anggota-anggota organisasi maupun anggaran yang digunakan untuk mensupor kegiatan organisasi tersebut karena tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan lainnya. Selain dari pada itu demi tercapainya tujuan suatu keorganisasian, maka perlu adanya jalur koordinasi aktivitas dalam peningkatan sebuah pola atau metode yang merupakan bagian dari arah suatu keorganisasian demi tercapainya efektivitas pengelolaan anggaran atau *budget* dalam organisasi.

Efektivitas suatu organisasi dikenal dua jenis, yaitu efektivitas dalam hal perekutan SDM dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran yang merupakan rencana awal untuk memulai suatu organisasi. Dalam hal ini, anggaran merupakan suatu perencanaan dalam organisasi ataupun perusahaan yang disusun secara sistematis untuk jangka waktu tertentu dan dijelaskan dalam satuan uang. Kemudian disusul dengan adanya penggunaan atau pelaksanaan anggaran untuk mewujudkan dari pada perencanaan tersebut dan tentu hal ini tidak lepas dari kontrol atau pengawasan yang ketat sehingga penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya dan akan dievaluasi atau dinilai oleh tim organisasi yang akan

melahirkan sebuah rekomendasi tentang penambahan atau pengurangan jumlah anggaran untuk periode berikutnya.

Dalam hal penggunaan anggaran di instansi pemerintahan yang bertindak sebagai pengawas penggunaan anggaran agar penggunaan atau pengelolaan anggaran betul-betul terlaksanakan dengan baik adalah anggota DPR RI dan Badan Pemeriksa Keuangan sedangkan untuk daerah bagian pengawasan anggaran adalah Inspektorat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebagai tim verifikasi dan validasi anggaran dengan maksud dan tujuan yaitu untuk mengetahui pengelolaan anggaran sudah sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, anggaran sebagai suatu estimasi atau perkiraan hasil kerja yang ingin dicapai berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan yang biasanya satu tahun yang diukur dalam ukuran finansial. Sedangkan anggaran sektor publik merupakan rencana operasional sebagai wujud perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Mardiasmo (2009 : 61). Seiring dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara berbunyi bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan stimulus ekonomi yang bertujuan mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian negara serta pemerataan pendapat dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Terkait dengan hal di atas, maka pemerintah Kabupaten Pohuwato mengeluarkan dasar hukum peraturan daerah yaitu Undang-undang Nomor 12

Tahun 1985 dan mengalami perubahan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994; dan Undang-undang nomor 21 Tahun 1997 kembali mengalami perubahan dimana Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 sebagai perubahan dari undang-undang tersebut; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.32 Tahun 2011 yang telah berulangkali mengalami perubahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019. berdasarkan peraturan-peraturan ini mengatur tentang APBD Tahun 2020.

Begitu pentingnya pengelolaan keuangan daerah, maka setiap instansi, kantor, badan dan dinas diharuskan mengelola anggarannya secara efektif sehingga tepat sasaran dan tepat guna sesuai peruntukannya. Hal ini juga sesuai dengan yang dinyatakan oleh Mardiasmo (2009 : 132) bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan, atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Begitu pentingnya pengelolaan keuangan daerah, maka setiap instansi, kantor, badan dan dinas diharuskan mengelola anggarannya secara efektif sehingga tepat sasaran dan tepat guna sesuai peruntukannya. Hal ini juga sesuai dengan yang dinyatakan oleh Mardiasmo (2009 : 132) bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan, atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu badan pengelolaan keuangan yang membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kas daerah yang meliputi kegiatan pengelolaan pembekalan, penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah yang meliputi tanggungjawab pemerintah kabupaten.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan formulasi judul, **“Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Pohuwato”**.

1.2. RumusanMasalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, “Apakah Pengelolaan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Pohuwato sudah berjalan efektif?”

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data terkait dengan masalah yang diteliti, terutama primer, yaitu data laporan keuangan.

1.3.2. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Anggaran pada Badan Keuangan di Kabupaten Pohuwato telah efektif atau belum.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini :

- 1. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengelola anggaran pada umumnya dan khususnya Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Pohuwato.

- 2. Bagi Akademisi**

Sebagai tambahan literatur, referensi dan bahan bacaan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sama dan juga sebagai sumbangan pemikiran dalam menyebarluaskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat.

- 3. Bagi Penulis**

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, serta dapat mengimplementasikan konsep dan teori dalam praktek yang sebenarnya khususnya mengenai konsep efektivitas pengelolaan anggaran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Efektivitas

2.1.1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan hal yang sangat penting jadi bahan pertimbangan dalam melakukan suatu kegiatan, karena efektivitas dapat digunakan sebagai suatu capaian keberhasilan atau output yang dihasilkan atas kegiatan tersebut.

Dengan berbagai ragam pendapat tentang pengertian efektivitas antara para ahli, hal ini berdasarkan dengan keilmuan masing-masing dari para ahli yang menafsirkannya, namun dalam hal ini memiliki makna dan tujuan yang sama. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.

Mahmudi (2011 : 22) menyatakan bahwa efektivitas merupakan dukungan antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau paket kebijakan. kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran aktif kebijakan.

Sedangkan menurut Soewartoyo (2007 : 163), mendefinisikan efektivitas adalah “suatu ketetapan tindakan atau kesempurnaan (jaminan) hasil suatu pekerjaan. Dengan demikian yang dimaksud dengan efektif adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan dengan usaha kerja sama.

Nawawi (2006) dalam skripsi Nawastri (2015 : 32), penggunaan anggaran adalah pencatatan hasil yang bekerja selama satu periode tertentu. Sementara itu, penggunaan anggaran menurut Mahsun (2006) dalam skripsi Nawastri (2015 : 32), merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Sejalan dengan pendapat tersebut, “Sondang P. Siagian yang dikutip oleh Othenk (2008 : 4) mengemukakan bahwa efektivitas yaitu penggunaan berbagai sumber yang telah direncanakan dengan maksud agar pelaksanaannya ke depan akan memberikan nilai kemanfaatan bagi organisasi, sejalan atau sesuai apa yang disampaikan oleh Mardiasmo (2004) bahwa efektivitas merupakan parameter keberhasilan keorganisasian atau kelembagaan dalam rangka pencapaian tujuan dan jika hal ini terwujud secara otomatis keorganisasian berjalan sesuai dengan harapan”.

Efektif merupakan pengukuran antara capaian dari hasil pekerjaan yang sudah direncanakan sebelumnya atau kesesuaian kehendak atas tindakan untuk mencapai hal tersebut. Sehingga efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan penerimaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang telah ditetapkan sebelumnya dan sudah buktikan. Namun, apabila *outcome* pekerjaan telah tercapaidan kegiatan yang telah dilaksanakan kurang sesuai yang menjadikan sasaran tak terwujud sebagaimana yang dinginkan, maka keefektifan usaha sesuai tujuan tidak tercapai.

Dengan demikian dalam menganalisa efektif atau tidaknya alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditinjau dari rasio antar kondisi riil dan sasaran dapat dilihat pada rumus di bawah ini:

Realisasi APBD

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi APBD}}{\text{Target APBD}} \times 100\%$$

Target APBD

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, penulis menyimpulkan yaitu efektif merupakan kondisi ditunjukkan secara riil atas kemampuan organisasi dalam hal penggunaan semua unsur-unsur yang berdasarkan dengan kesesuaian parameter yang sudah ditetapkan.

2.1.2. Kriteria Pencapaian Tujuan Efektif Atau Tidak

Untuk menentukan pencapaian efektif atau tidak tentang tujuan terkait dengan parameter yang secara umum dinyatakan oleh Sondang, sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap,

berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

4. Perencanaan yang matang,
pada hakikatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat,
suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersediannya sarana dan prasarana kerja,
salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi..
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien,
bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

Richard M. Steers mengutip Duncan menyatakan parameter efektif berdasarkan bukunya yang berjudul “Efektivitas Organisasi” yakni :

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin

terjamin, diperlukan penahapan, baik dalam arti penahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun penahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkret.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

2.1.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas dalam sebuah organisasi atau perusahaan, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.

a. Karakteristik Organisasi (struktur dan organisasi)

Penekanan ciri organisasi oleh Steers adalah terhadap struktur dan teknologi karena kedua variabel tersebut sangat mempengaruhi efektivitas organisasi. Perubahan yang bersifat inovatif dalam hubungan interaktif antar anggota-anggota organisasi atau penyusunan hubungan SDM akan meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan tercapainya berbagai kemajuan di dalam struktur

organisasi, misalnya dengan meningkatkan spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan dan formalisasi akan meningkatkan produktivitas organisasi.

Tercapainya kemajuan di dalam teknologi dapat memperkenalkan cara-cara yang lebih produktif dengan menggunakan sarana-sarana baru akan mempengaruhi efektivitas organisasi. Pemanfaatan kedua hal tersebut secara baik, yakni struktur dan teknologi akan mempermudah organisasi untuk mencapai tujuannya.

b. Karakteristik Lingkungan (ketepatan atas keadaan lingkungan)

Karakteristik lingkungan ini mencapai dua aspek yang saling berhubungan yaitu lingkungan ekstern dan lingkungan intern. Lingkungan ekstern yaitu semua lingkungan kekuatan yang timbul diluar batasan-batasan organisasi. Lingkungan interen pada umumnya dikenal sebagai iklim organisasi yang meliputi bermacam-macam atribut lingkungan kerja.

c. Karakteristik Pekerjaan (perbedaan sifat pekerja)

Lingkungan dalam bekerja memiliki pandangan tujuan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda, individu ini memiliki pengaruh langsung terhadap rasa ketertarikan pada organisasi dan potensi kerja. Tanpa rasa keterkaitan dan prestasi, efektivitas mustahil akan tercapai.

d. Kebijakan dan praktek manajemen

Kebijakan dan praktek manajemen merupakan mekanisme yang meliputi penetapan tujuan strategi, pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan

dan pengembalian keputusan serta adaptasi dan inovasi organisasi. Dalam hal ini, manager sangat penting untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan secara profesional untuk mencapai tujuan.

2.1.4. Efektivitas Anggaran

Penganggaran adalah suatu bentuk statement dari pada rencana dan kebijakan manajemen yang digunakan dalam suatu periode tertentu sebagai petunjuk dalam periode itu, Halim dan Damayanti (2007 : 142). Sedangkan menurut Mardiasmo (2012 : 61) anggaran merupakan pernyataan dari estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Menurut Mardiasmo (2002 : 26) ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas anggaran, antara lain :

1. Kompetensi sumber daya manusia
2. Informasi
3. Orientasi tujuan
4. Penggunaan anggaran itu sendiri
5. Gaya kepemimpinan
6. Komitmen

2.2. Anggaran

2.2.1. Pengertian Anggaran

Dalam sebuah organisasi maupun instansi pemerintah diperlukan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di masa yang akan datang. Agar tercapainya tujuan dan sasaran yang dimaksud diperlukan suatu perencanaan. Perencanaan dirumuskan untuk menggambarkan apa yang ingin dicapai dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Pencapaian tujuan dalam sebuah organisasi ditentukan oleh adanya perencanaan yang matang.

Berikut pendapat beberapa para ahli mengenai anggaran :

Julita dan Jufrizien (2012 : 9) mengatakan bahwa anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan.

Nafarin (2013 : 11) “mendefinisikan bahwa anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis suatu organisasi yang dinyatakan dalam suatu uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa”. Sedangkan menurut Munandar (2010 : 1) anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu periode tertentu yang akan datang.

Penganggaran yaitu rencana aktivitas organisasi atau perusahaan yang mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi. Pada umumnya anggaran disusun secara tertulis, Prawironegoro dan Purwanti (2009 : 112).

Menurut Bastian (2006 : 163), “anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Di dalam tampilannya, anggaran selalu menyertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Kebanyakan organisasi sektor publik melakukan pembedaan krusial antara tambahan modal dan penerimaan, serta tambahan pendapatan dan pengeluaran. Dampaknya adalah pemisahan penyusunan anggaran tahunan dan anggaran modal tahunan”. Jenis anggaran sektor publik adalah :

- a. Anggaran Negara dan Daerah APBN/APBD (*Budget Of State*).
- b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP), yaitu anggaran usaha setiap BUMN/BUMD serta badan hukum publik atau publik-swasta.

National Committee on Governmental Accounting (NCGA) yang saat ini telah menjadi *Govermental Accounting Standards Board (GASB)*, dalam Bastian (2006: 164), definisi anggaran (*budget*) adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diharapkan untuk membiayai dalam periode tertentu.

Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Anggaran merupakan suatu rencana tertulis tentang kegiatan dalam sebuah organisasi untuk jangka waktu tertentu dan biasanya dinyatakan dalam bentuk uang, oleh karena itu butuh perencanaan dalam penggunaannya.

2.2.2. Tahapan dan Aspek Pengelolaan Anggaran

a. Tahapan dan Aspek Pengelolaan Anggaran

Tahapan anggaran yang dikenal dengan siklus anggaran menurut Mardiasmo (2009 : 70) :

1. Tahap Persiapan Anggaran (*preparation*). Dalam tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar pendapatan yang tersedia.
2. Tahap ratifikasi anggaran. Tahap ini melibatkan proses politik. Pada tahap ini pimpinan eksekutif harus memiliki managerial skill serta political skill juga *salesmanship* dan mempunyai kemampuan untuk menjawab dan membeberkan argumen yang rasional atas segala bantahan dari pihak legislatif.
3. Tahap pelaksanaan anggaran. Tahap ini memiliki sistem informasi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer Keuangan dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi dalam hal pelaksanaan anggaran yang memadai dan handal.
4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran. Tahap ini terkait dengan aspek akuntabilitas. Bila tahap pelaksanaan telah didukung dengan sistem yang pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan pada tahap ini akan banyak menemui masalah.

b. Asas-Asas Pengelolaan Anggaran

Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yang terdiri dari:

1. Asas tahunan, artinya membatasi masa berlakunya atau periode anggaran untuk suatu tahun tertentu, mulai dari 1 Januari – 31 Desember.
2. Asas universalitas, mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
3. Asas spesialitas, mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
4. Asas kesatuan, menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.

(<https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/12/18/asas-asas-umum-pengelolaan-keuangan-negara/>di akses 22 Maret 2021)

2.2.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah. Berikut pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut para ahli :

Halim (2012 : 10) mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Sedangkan

Menurut Badrudin (2012 : 97) APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah.

Menurut Mardiasmo (2012 : 103) APBD merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Lanjutnya, anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja, alat bantu untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Anggaran merupakan suatu rencana tertulis organisasi yang dapat dinyatakan dalam bentuk uang maupun barang/jasa dan disusun secara sistematis meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit dan berlaku untuk jangka waktu tertentu.

2.2.4. Jenis-Jenis Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah

1. Anggaran Pendapatan, terdiri atas
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Penerimaan lainnya.

- b. Bagian Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus.
 - c. Lain-lain pendapatan yang sah seperti Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatan Lain-Lain.
2. Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
 3. Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. (https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah diakses, 22 Maret 2021)

2.2.5. Unsur-Unsur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Halim (2012 : 22) Unsur-unsur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sebagai Berikut :

1. Rencana Kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
2. Adapun sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka
4. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

2.2.6. Landasan Hukum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 Mengenai Pemerintah daerah
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Mengenai Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Mengenai Pedoman pengurusan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah dan juga tata cara pengawasan, penyusunan serta penghitungan APBD.
4. PP Nomor 105 Tahun 2000 mengenai pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

2.2.7. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diantaranya antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi Otoritas

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendapatan serta belanja negara pada tahun anggaran tertentu.

2. Fungsi Perencanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan anggaran keuangan daerah pada tahun anggaran tertentu.

3. Fungsi Pengawasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berfungsi untuk mengawasi kinerja dari pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah.

4. Fungsi Alokasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berfungsi sebagai pedoman dalam alokasi dana yang tepat bagi peningkatan perekonomian daerah. Alokasi penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah haruslah sesuai dengan tujuan peningkatan perekonomian tersebut.

5. Fungsi Distribusi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah haruslah didistribusikan secara merata dan adil.

6. Fungsi Stabilitas

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dapat menjadi instrumen dalam kestabilan ekonomi daerah.

2.2.8. Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) ini disusun dengan tujuan untuk dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah di dalam mengatur penerimaan serta juga belanja untuk pelaksanaan pembangunan daerah sehingga kesalahan, pemborosan serta juga penyelewengan yang merugikan itu dapat dihindari. Dibawah ini merupakan tujuan APBD yang lain diantaranya sebagai berikut :

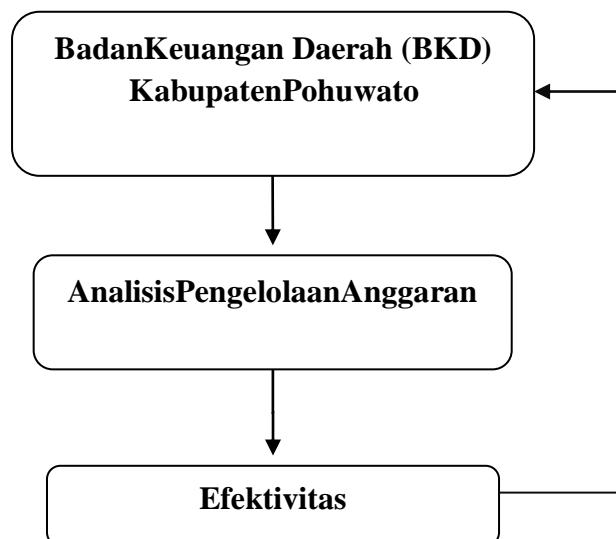
1. Membantu pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah itu mencapai tujuan fiskal
2. Meningkatkan pengaturan atau juga kordinasi tiap-tiap bagian-bagian yang berada pada lingkungan pemerintah daerah.

3. Membantu menghadirkan serta juga menciptakan efisiensi dan keadilan terhadap penyediaan barang dan jasa publik dan juga umum.
4. Menciptakan perioritas belanja atau juga keutaman belanja pemerintahan daerah.
5. Menghadirkan serta juga meningkatkan transparansi pemerintah daerah terhadap masyarakat luas serta juga pemerintah daerah dapat atau bisa mempertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).

2.3. Kerangka Pikir

Menurut Riduwan (2010: 25) kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesikan darifakta-fakta, observasi dan telah kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Untuk memudahkan pemahaman mengenai penelitian yang telah dilakukan, maka disajikan bagan kerangka pikir penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



2.4. Hipotesis

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah serta teori-teori yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian “Pengelolaan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Pohuwato Belum Efektif”.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek dan Waktu Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian adalah menganalisis efektivitas pengelolaan anggaran. Penelitian ini dilakukan penulis pada badan keuangan daerah di Kabupaten Pohuwato, waktu penelitian kurang lebih selama 3 bulan.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Desain Penelitian

Menurut Huseinumar (2002 : 36) “bahwa desain penelitian adalah suatu rencana kerja yang terstruktur dan konfrehensif mengenai hubungan-hubungan antara variabel yang disusun sedemikian rupa agar hasil penelitiannya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Penelitian ini dilakukan, dengan menggunakan deskriptif persentase, Dalam penelitian ini peneliti berusaha menggambarkan tentang analisis efektivitas pengelolaan anggaran pada badan keuangan daerah di Kabupaten Pohuwato.

3.2.2. Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini adalah variabel tunggal yakni efektivitas pengelolaan anggaran pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Pohuwato.

3.2.3. Definisi Oprasionalisasi Variabel

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel tunggal dan digunakan beberapa indikator untuk menilai keefektifan pengelolaan anggaran. Definisi operasionalisasi variabel penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Efektivitas Pengelolaan Anggaran	Kompetensi sumber daya manusia Informasi Orientasi tujuan Penggunaan anggaran itu sendiri Gaya kepemimpinan Komitmen	Ordinal

Sumber : Mardiasmo,(2002 : 26)

Pada penelitian ini yang dilakukan penulis pembobotan untuk setiap pilihan atau alternatif pada kuisioner berdasarkan skala likert. Menurut Kinnear dalam Husein Umar (2002 : 98) menguraikan bahwa skala likertberhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu. Alternatif pernyataannya, misalnya dari sangat efektif dan tidak efektif sangat setuju sampai tidak setuju, atau sangat baik sampai tidak baik, sangat senang, sangat puas sampai tidak puas dan seterusnya.

Tabel 3.2 Skor Alternatif Skala Likert

Keterangan	Skor
Sangat Efektif	5
Efektif	4
Cukup Efektif	3
Kurang Efektif	2
Tidak Efektif	1

Sumber: *Husain Umar, 2002*

3.3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sebagai bahan dalam penyusunan penelitian ini, maka digunakan metode sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu melakukan penelitian langsung terhadap obyek yang menjadi sasaran penelitian.
- b. Kuisioner, yakni metode pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner atau angket untuk dibagikan kepada responden.
- c. Dokumentasi, yaitu peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen dari tempat penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Data
 - a. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak dalam bentuk angka-angka tetapi, berupa gambaran umum organisasi, sejarah singkat organisasi, maupun informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian ini
 - b. Data kuantitatif, yaitu data yang dapat dihitung atau data yang berupa angka-angka yang akan diteliti dalam nilai atau ukuran yang relevan dalam penelitian ini.
2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Data Primer

Yaitu data yang bersumber dari lokasi penelitian berupa data utama yang akan dianalisis, dalam hal ini data yang diperoleh melalui kuisioner atau penyebaran angket.

- b. Data Sekunder

Yaitu data yang bersumber dari data kedua dan berfungsi sebagai data pendukung dalam memecahkan pokok permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

3.5. Populasi

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2018 : 80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dengan demikian populasi merupakan sumber suatu penyimpulan atas suatu fenomena. Sasaran populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang mengetahui tentang pengelolaan anggaran sebanyak 35 orang.

3.6. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif persentasi (%) dan juga dengan menggunakan rumus rasio efektivitas. Metode analisis deskriptif persentase ini digunakan untuk mengkaji efektivitas pengelolaan anggaran pada badan keuangan daerah di Kabupaten Pohuwato. Deskriptif persentase ini diolah dengan cara frekuensi dibagi dengan jumlah responden dikali 100%. Sedangkan rumus rasio efektivitas untuk mengetahui sejauhmana efektifnya penggunaan anggaran belanja daerah. Adapun rumus yang digunakan yaitu deskriptif persentasi (%) dengan mengacu pada pendapat Sudjana (2010) sebagaimana berikut:

$$p = \frac{f}{n} \times 100 \%$$

Keterangan:

P = Persentase

f = Frekuensi

n = JumlahResponden

100% = BilanganTetap

Adapun standar pengukuran penelitian ini yakni dengan menggunakan skala likert sebagaimana Sugiyono (2018 : 93) menyatakan bahwa indikator-indikator yang terukur ini dapat dijadikan sebagai titik tolak untuk membuat item instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang perlu dijawab oleh responden. Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata, misalnya:

Tabel. 3.3. Skala Likert

Keterangan	Simbol	Skor
Sangat Efektif	SE	5
Efektif	E	4
Cukup Efektif	CE	3
Kurang Efektif	KE	2
Tidak Efektif	TE	1

Sumber: Sugiyono (2018 : 93), Model dikembangkan

Berdasarkan standar pengukuran skala Likert tersebut di atas, maka rancangan perhitungan pembobotan adalah sebagai berikut :

$$\text{Bobot terendah} \times \text{item} \times \text{jumlah responden} = 1 \times 1 \times 35 = 35$$

$$\text{Bobot tertinggi} \times \text{item} \times \text{jumlah responden} = 5 \times 1 \times 35 = 175$$

Dari perhitungan rentang bobot terendah sampai pada bobot tertinggi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rentang Skala} = \frac{175-35}{5} = 28$$

Berdasarkan hasil perhitungan bobot tersebut di atas, maka rentang skala pengukuran terhadap skor item dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3.4. Rentang Skala Pengukuran Terhadap Skor Item

Range	Kategori
35–63	Tidak Efektif
64–92	Kurang Efektif
93–121	Cukup Efektif
122–150	Efektif
151–179	Sangat Efektif

Sumber : Rancangan Data Olahan Penelitian, 2021

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah BKD Kabupaten Pohuwato

Seiring dengan adanya keinginan untuk mengejar ketinggalan dengan provinsi lain agar bisa sejajar dalam hal pembangunan, maka dalam hal ini Provinsi Gorontalo konsen dalam 3 program unggulan yaitu :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Pertanian
3. Pengembangan Ekonomi Kelautan

Provinsi Gorontalo yang terbentuk berdasarkan UU No. 38 Tahun 2000, memiliki luas wilayah 1.221.544 Ha, yang secara administratif meliputi 6 wilayah kabupaten dan kota, yaitu : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo Utara yang baru terbentuk.

Kabupaten Pohuwato merupakan bagian administratif pemerintah Kabupaten Boalemo dimana hal ini berlangsung dari tahun 1999 – Mei 2003. Sejak tahun 2002 atau satu tahun sebelum terbentuk Kabupaten Pohuwato, keinginan semangat dan aspirasi masyarakat untuk membentuk suatu kabupaten devinitif begitu kuat. Keinginan tersebut juga paling besar dipengaruhi oleh polemik kedudukan Ibukota Kabupaten Boalemo yang tertuang dalam UU No. 50

Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo, Kabupaten Buol dan Kabupaten Moroweali yaitu pasal 7 dan 8 yang isinya untuk sementara waktu Ibukota Kabupaten Boalemo berkedudukan di Tilamuta. Kemudian 5 tahun setelah pemerintah berjalan, Ibukota Kabupaten harus dialihkan ke Kecamatan Marisa. Polemik tersebut akhirnya disikapi oleh masyarakat dan para stakeholder bersama pemerintah terkait untuk mengupayakan penyelesaian secara damai, arif dan bijaksana.

Berbagai upaya dilakukan oleh tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan komponen lainnya berjuang mewujudkan Kabupaten Pohuwato, yang akhir perjuangan tersebut berhasil dengan keluarnya UU No. 6 Tahun 2003 Tentang pembentukan Kabupaten Pohuwato dan Bone Bolango yang disahkan melalui sidang paripurna Dewan DPR RI tanggal 6 Mei 2003. Keluarnya Undang-undang ini merupakan titik klimaks dari rangkaian perjuangan seluruh komponen masyarakat untuk membentuk suatu kabupaten tersendiri, sehingga hal ini perlu disyukuri oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Pohuwato dengan cara berpartisipasi dalam menjaga kelanjutan pembangunan di Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan perjalanan sejarah ini, akhirnya setiap tanggal 6 Mei ditetapkan sebagai hari ulang tahun Kabupaten Pohuwato.

Dengan adanya kebijakan Pemerintah pusat yang tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah serta memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Hal ini berarti bahwa setiap daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai potensi masing-masing daerah untuk lebih kreatif dalam mengembangkan potensi daerahnya, sehingga mampu menjalankan roda pemerintah.

Menyikapi kondisi tersebut Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah telah menyusun rencana kerja yang berorientasi pada hasil yang dicapai berdasarkan isu-isu yang telah diangkat Musrembang Kecamatan. Adapun tugas dan fungsi Badan Pengelolah dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato, memperhatikan potensi, peluang, kendala yang ada dan yang akan mungkin terjadi, guna meningkatkan pelayanan masyarakat sehingga terwujudnya pemerintahan yang *Good Governance*.

Dalam pembangunan nasional peranan manusia selaku aparatur semakin penting dirasakan kehadirannya sebagai faktor yang menentukan keberhasilan program pemerintah. Olehnya, semangat pengabdian, keterampilan, kecakapan, disiplin kerja dan profesionalisme aparatur akan sangat memajukan peningkatan kewajiban pemerintah.

Namun di sisi lain bagaimanapun ahli dan terampilnya pegawai apabila pengelolaanya tidak teratur dan tidak sistematik, maka pendayungannya tidak akan optimal. Oleh karena itu, manajemen Pegawai Negeri Sipil yang terorganisasi merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, penyelenggaraan pemerintahan.

4.1.2 Perkembangan BKD Kabupaten Pohuwato

Langkah awal BKD Kabupaten Pohuwato dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah merumuskan Visi, Misi dan Strategi Umum. Visi, Misi dan Strategi tersebut merupakan jawaban terhadap tuntunan dinamika internal dan eksternal yaitu pengaruh globalisasi dan adanya otonomi daerah dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang antara lain berisi pemberian otonomi luas bagi daerah Kabupaten/Kota serta pemberian otonomi daerah terbatas bagi daerah provinsi.

Dengan otonomi daerah diharapkan BKD Kabupaten Pohuwato dapat berkembang dengan potensi dan sumber daya yang dimilikinya sehingga mampu mewujudkan suatu masyarakat dan pemerintah yang berkualitas dan mampu menghadapi dunia global.

4.1.3 Visi dan Misi BKD Kabupaten Pohuwato

a. Visi

“Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Akuntabel berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan”

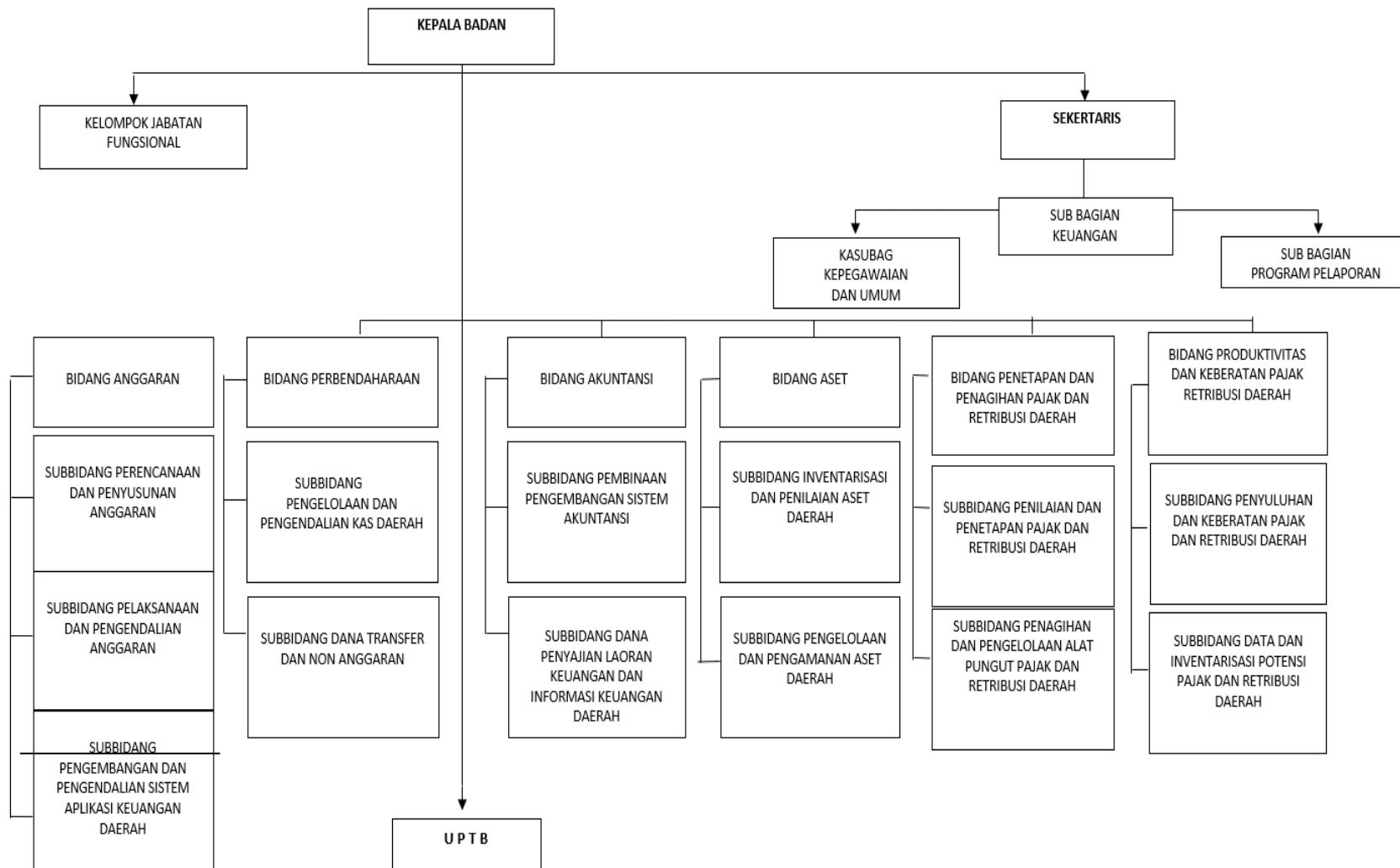
b. Misi

“Mengembangkan Sarana Prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik dan kelancaran administrasi pemerintahan”

4.1.4 Struktur Organisasi

Strukutur organisasi merupakan komponen kerja berdasarkan batasan pembagian kerja dalam sebuah lembaga yang resmi dengan maksud agar pekerjaan setiap sumber daya yang ada ditangani oleh bagian-bagian tersebut tanpa mesti harus menunggu perintah dari pimpinan organisasi. Adapun struktur organisasi yang ada pada BKD Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut:

**GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN POHuwato**



Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1.5 Hasil Penelitian

Total pernyataan/pertanyaan pada penelitian ini yaitu 6 butir dan setiap butir pernyataan/pertanyaan dijawab oleh 35 responden sebagai sampel pada penelitian ini dan selanjutnya masing-masing indikator dari setiap variabel akan dilakukan pendeskripsian.

Pertama kali yang dilakukan untuk mendeskripsikan setiap indikator pada penelitian ini adalah membuat tabel kategori atau skala penilaian untuk setiap butir pernyataan/pertanyaan, kemudian dibuatkan skala penilaian untuk masing-masing item pernyataan/pertanyaan dengan terlebih dahulu menghitung rentang skalanya. Adapun hasil perhitungannya, yakni:

$$\text{Bobot terendah} \times \text{item} \times \text{Jumlah responden} = 1 \times 1 \times 35 = 35$$

$$\text{Bobot tertinggi} \times \text{item} \times \text{Jumlah responden} = 5 \times 1 \times 35 = 175$$

Dari perhitungan rentang bobot terendah sampai pada bobot tertinggi adalah:

$$175 - 35$$

$$\text{Rentang Skala} = \frac{175 - 35}{5} = 28$$

Berdasarkan hasil perhitungan bobot tersebut di atas, maka rentang skala pengukuran terhadap skor item dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 4.1. Rentang Skala Pengukuran Terhadap Skor Item

Range	Kategori
35 - 63	Tidak Efektif
64 - 92	Kurang Efektif
93 - 121	Cukup Efektif
122 - 150	Efektif
151 - 179	Sangat Efektif

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2021

Dengan demikian deskripsi jawaban responden untuk setiap pernyataan/pertanyaan untuk setiap indikator dalam setiap variabel dilihat pada deskripsi berikut ini.

Deskriptif variabel penelitian ini deskriptif yang digunakan yaitu tanggapan responden, bobot, frekuensi, skor dan persentase tentang efektivitas pengelolaan anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato sebagaimana variasi jawaban mereka sebagai berikut:

Tabel 4.2. Tanggapan responden pada kontribusi sumber daya manusia dalam penyusunan anggaran sesuai dengan kompetensinya diantaranya menetukan seberapa besar biaya yang dibutuhkan

Tanggapan Responden	Bobot	Frek.	Skor	Persentase
Sangat Efektif	5	13	65	37,14
Efektif	4	14	56	40,00
Cukup Efektif	3	6	18	17,14
Kurang Efektif	2	2	4	5,71
Tidak Efektif	1	0	0	0

Jumlah	35	143	100
--------	----	-----	-----

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel 4.2. tersebut di atas, menunjukkan bahwa tanggapan dari 35 responden pada item pertama yaitu kontribusi sumber daya manusia dalam penyusunan anggaran sesuai dengan kompetensinya diantaranya menentukan seberapa besar biaya yang dibutuhkan yaitu sebanyak 13 responden yang menjawab sangat efektif atau 37,14% dengan skor 65, sebanyak 14 responden yang menjawab efektif atau 40% dengan skor 56 dan sebanyak 6 responden atau 17,14% yang menjawab cukup efektif diberi skor 18 serta sebanyak 2 responden atau 5,71% yang menjawab kurang efektif diberi skor 4. Adapun total skor pada item pertama yaitu 143. Artinya, item pernyataan ini masuk dalam kategori efektif.

Tabel 4.3. Tanggapan responden tentang diterapkannya informasi kebijakan penyusunan perencanaan anggaran sesuai dengan visi dan misi pemerintah

Tanggapan Responden	Bobot	Frek.	Skor	Persentase
Sangat Efektif	5	13	65	37,14
Efektif	4	11	44	31,43
Cukup Efektif	3	8	24	22,86
Kurang Efektif	2	3	6	8,57
Tidak Efektif	1	0	0	0
Jumlah		35	139	100

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel 4.3. tersebut di atas, menunjukkan bahwa tanggapan dari 35 responden pada item kedua yaitu telah diterapkannya informasi kebijakan penyusunan perencanaan anggaran sesuai dengan visi dan misi pemerintah yaitu sebanyak 13 responden yang menjawab sangat efektif atau 37,14% dengan skor 65, sebanyak 11 responden yang menjawab efektif atau 31,43% dengan skor 44 dan sebanyak 8 responden atau 22,86% yang menjawab cukup efektif diberi skor 24 serta sebanyak 3 responden atau 8,57% yang menjawab kurang efektif diberi skor 6. Adapun total skor pada item pertama yaitu 139. Artinya, item pernyataan ini masuk dalam kategori efektif.

Tabel 4.4. Tanggapan responden tentang kebijakan anggaran berupa program dan kegiatan telah sesuai tujuan pemerintah dan dialokasikan berdasarkan pendanaannya yang berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai

Tanggapan Responden	Bobot	Frek.	Skor	Persentase
Sangat Efektif	5	8	40	22,86
Efektif	4	15	60	42,86
Cukup Efektif	3	8	24	22,86
Kurang Efektif	2	4	8	11,43
Tidak Efektif	1	0	0	0,00
Jumlah		35	132	100

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel 4.4. tersebut di atas, menunjukkan bahwa tanggapan dari 35 responden pada item ketiga yaitu kebijakan anggaran berupa program dan kegiatan telah sesuai tujuan pemerintah dan dialokasikan berdasarkan

pendanaannya yang berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai yaitu sebanyak 8 responden yang menjawab sangat efektif atau 22,86% dengan skor 40, sebanyak 15 responden yang menjawab efektif atau 42,86% dengan skor 60 dan sebanyak 8 responden atau 22,86% yang menjawab cukup efektif diberi skor 24 serta sebanyak 4 responden atau 11,43% yang menjawab kurang efektif diberi skor 8. Adapun total skor pada item pertama yaitu 132. Artinya, item pernyataan ini masuk dalam kategori efektif.

Tabel 4.5. Tanggapan responden tentang telah digunakannya anggaran untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tanggapan Responden	Bobot	Frek.	Skor	Persentase
Sangat Efektif	5	9	45	25,71
Efektif	4	15	60	42,86
Cukup Efektif	3	8	24	22,86
Kurang Efektif	2	3	6	8,57
Tidak Efektif	1	0	0	0,00
Jumlah		35	135	100

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut di atas, menunjukkan bahwa tanggapan dari 35 responden pada item keempat yaitu telah digunakannya anggaran untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu sebanyak 9 responden yang menjawab sangat efektif atau 25,71% dengan skor 45, sebanyak 15 responden yang menjawab efektif atau 42,86% dengan skor 60 dan sebanyak 8 responden atau 22,86% yang menjawab

cukup efektif diberi skor 24 serta sebanyak 3 responden atau 8,57% yang menjawab kurang efektif diberi skor 6. Adapun total skor pada item pertama yaitu 135. Artinya, item pernyataan ini masuk dalam kategori efektif.

Tabel 4.6. Tanggapan responden tentang kebijakan dari pimpinan dalam hal pelaksanaan anggaran berupa program dan kegiatan sesuai hasil kesepakatan para sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya

Tanggapan Responden	Bobot	Frek.	Skor	Persentase
Sangat Efektif	5	17	85	48,57
Efektif	4	14	56	40,00
Cukup Efektif	3	4	12	11,43
Kurang Efektif	2	0	0	0
Tidak Efektif	1	0	0	0
Jumlah		35	153	100

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, dimana tanggapan responden sebanyak 35 orang pada item kelima yaitu kebijakan dari pimpinan dalam hal pelaksanaan anggaran berupa program dan kegiatan sesuai hasil kesepakatan para sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya, sebanyak 17 responden yang menjawab sangat efektif atau 48,57% dengan skor 85, sebanyak 14 responden yang menjawab efektif atau 40% dengan skor 56 dan sebanyak 4 responden atau 11,43% yang menjawab cukup efektif diberi skor 12. Adapun total skor pada item pertama yaitu 153. Artinya, item pernyataan ini masuk dalam kategori sangat efektif.

Tabel 4.7. Tanggapan responden penerapan kegiatan pelaksanaan anggaran

**berdasarkan penyusunan perencanaan anggaran sesuai dengan
komitmen yang ada dalam visi dan misi pemerintah**

Tanggapan Responden	Bobot	Frek.	Skor	Persentase
Sangat Efektif	5	8	40	22,86
Efektif	4	10	40	28,57
Cukup Efektif	3	10	30	28,57
Kurang Efektif	2	7	14	20,00
Tidak Efektif	1	0	0	0
Jumlah		35	124	100

Sumber :Data Olahan, 2021

Dari tabel 4.7. di atas, menunjukkan bahwa tanggapan dari 35 responden pada item keenam yaitu penerapan kegiatan pelaksanaan anggaran berdasarkan penyusunan perencanaan anggaran sesuai dengan komitmen yang ada dalam visi dan misi pemerintah sebanyak 8 responden yang menjawab sangat efektif atau 22,86% dengan skor 40, sebanyak 10 responden yang menjawab efektif atau 28,57% dengan skor 40 dan sebanyak 10 responden atau 28,57% yang menjawab cukup efektif diberi skor 30 serta sebanyak 7 responden atau 20% yang menjawab kurang efektif diberi skor 14. Adapun total skor pada item pertama yaitu 124. Artinya, item pernyataan ini masuk dalam kategori efektif.

4.1.6 Pembahasan

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian di atas, maka perlu diuraikan untuk mengetahui kejelasan efektivitas penggunaan anggaran yang terjadi pada BKD Kabupaten Pohuwato, untuk itu ringkasan hasil deskripsi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.8. Rekapitulasi Hasil Analisis Deskriptif Tanggapan Responden

Item	Pernyataan/Pertanyaan	Skor	Kategori
1.	Kontribusi sumber daya manusia dalam penyusunan anggaran sesuai dengan kompetensinya diantaranya menetukan seberapa besar biaya yang dibutuhkan	143	E
2.	Telah diterapkannya informasi kebijakan penyusunan perencanaan anggaran sesuai dengan visi dan misi pemerintah	139	E
3.	Kebijakan anggaran berupa program dan kegiatan telah sesuai tujuan pemerintah dan dialokasikan berdasarkan pendanaannya yang berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai	132	E
4.	Telah digunakannya anggaran untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	135	E
5.	Kebijakan dari pimpinan dalam hal pelaksanaan anggaran berupa program dan kegiatan sesuai hasil kesepakatan para sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya	153	SE
6.	Penerapan kegiatan pelaksanaan anggaran berdasarkan penyusunan perencanaan anggaran sesuai dengan komitmen yang ada dalam visi dan misi pemerintah	124	E

Sumber: Hasil Olahan Data, 2021

Dari tabel 4.8. di atas, menunjukkan lima item pernyataan/pertanyaan ditanggapi oleh 35 responden tentang pengelolaan anggaran di BKD Kabupaten Pohuwato dinyatakan efektif, bahkan satu item pernyataan/pertanyaan yang ditanggapi oleh responden sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di BKD Kabupaten Pohuwato sudah efektif. Adapun rekapitulasi total perolehan penilaian dari keenam item tersebut yaitu $826 : 6 = 137,67$ hal ini masuk pada kategori efektif. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan pengelolaan anggaran pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Pohuwato belum efektif, ditolak.

Sekalipun penilaian pada semua item tersebut sudah masuk pada kategori efektif, namun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, misalnya pada item penerapan kegiatan pelaksanaan anggaran berdasarkan penyusunan perencanaan anggaran sesuai dengan komitmen yang ada dalam visi dan misi pemerintah. berdasarkan pernyataan di atas, mengisyaratkan bahwa dalam menyusun rencana anggaran harus dikolaborasikan dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai sebuah regulasi yang wajib dipedomani oleh setiap dinas, kantor, badan dan lain-lain yang di bawah naungan pemerintah setempat.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesesuaian kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh BKD Kabupaten Pohuwato menunjukkan kemampuan yang baik dalam penyusunan anggaran karena hasilnya sudah efektif sebagaimana respon dari 35 responden yang rata-rata menyatakan efektif dan masuk pada kategori penilaian efektif.
2. Informasi, orientasi tujuan, penggunaan anggaran itu sendiri dan gaya kepemimpinan serta komitmen juga masuk dalam kategori penilaian efektif karena rata-rata dari 35 responden menyatakan efektif.

5.2. Saran

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka disarankan sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pimpinan BKD Kabupaten Pohuwato untuk tetap memperhatikan dan mempertahankan pengelolaan anggarannya agar tetap efektif berdasarkan dengan enam item pernyataan responden yang dianalisis.
2. Diharapkan kepada peneliti yang akan datang yang ingin meneliti dalam bidang yang sama agar menambah item-item lain yang dapat digunakan sebagai penilaian efektivitas pengelolaan anggaran.

Jadwal Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan hormat

Kepada :

Pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato
di.

Marisa

I. Identitas Peneliti

Saya Mahasiswa Universitas Ichsan Gorontalo yang beridentitas:

Nama : Fatma Yusuf

Jurusan : Manajemen

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Bermaksud untuk melakukan penelitian terkait dengan judul, **“Analisis Efektifitas Pengelolaan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato”**. Untuk maksud tersebut data-data yang kami butuhkan hanya untuk melengkapi tugas akhir kami.

II. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Dimohon kiranya Bapak/Ibu untuk memberikan tanggapan/jawaban yang sesuai atas pernyataan/ pertanyaan dengan memilih skor yang tersedia dengan tanda silang (X) secara objektif dan identitas bapak/ibu akan kami rahasiakan.

Apabila menurut Bapak/Ibu tidak ada jawaban yang tepat pada kolom item pernyataan/pertanyaan yang telah disediakan, maka jawaban dapat diberikan pada pilihan yang paling mendekati menurut pendapat Bapak/Ibu. Jawaban dituangkan dalam bentuk skala berupa angka antara 1 s.d. 5, dimana semakin besar angka

menunjukkan semakin efektif terhadap pertanyaan/ pernyataan. Adapun skor jawaban dari setiap item pernyataan/pertanyaan sebagai berikut:

Keterangan	Simbol	Skor
Sangat Efektif	SE	5
Efektif	E	4
Cukup Efektif	CE	3
Kurang Efektif	KE	2
Tidak Efektif	TE	1

Akhir kata, kami ucapkan terimakasih atas kesediaan bapak/ibu yang telah berkontribusi memberikan tanggapan/jawabannya.

III. Kuesioner Penelitian:

Pernyataan	Penilaian				
	TE	KE	CE	E	SE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kontribusi sumber daya manusia dalam penyusunan anggaran sesuai dengan kompetensinya diantaranya menetukan seberapa besar biaya yang dibutuhkan					
2. Telah diterapkannya informasi kebijakan penyusunan perencanaan anggaran sesuai dengan visi dan misi pemerintah					
3. Kebijakan anggaran berupa program dan kegiatan telah sesuai tujuan pemerintah dan dialokasikan berdasarkan pendanaannya yang berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai					
4. Telah digunakannya anggaran untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.					
5. Kebijakan dari pimpinan dalam hal pelaksanaan anggaran berupa program dan kegiatan sesuai hasil kesepakatan para sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya					
6. Penerapan kegiatan pelaksanaan anggaran berdasarkan penyusunan perencanaan anggaran sesuai dengan komitmen yang ada dalam visi dan misi pemerintah					

“Terimakasih Atas Partisipasinya Telah Memberikan Tanggapannya”

Tabulasi Data

No.	Item Pertanyaan						Total	Rata-Rata
	1	2	3	4	5	6		
1	4	5	4	5	5	5	28	4,67
2	5	5	2	4	5	3	24	4,00
3	4	5	3	5	4	4	25	4,17
4	5	5	4	4	5	4	27	4,50
5	4	5	4	4	5	5	27	4,50
6	4	5	2	4	5	2	22	3,67
7	4	5	3	3	4	5	24	4,00
8	5	4	5	2	5	5	26	4,33
9	5	3	3	3	4	5	23	3,83
10	4	2	5	5	5	3	24	4,00
11	5	3	5	2	5	3	23	3,83
12	4	5	3	3	3	2	20	3,33
13	3	3	4	4	4	3	21	3,50
14	5	3	4	4	5	3	24	4,00
15	5	4	4	3	5	4	25	4,17
16	3	4	4	4	5	4	24	4,00
17	4	3	5	5	4	3	24	4,00
18	4	2	4	5	3	2	20	3,33
19	4	3	4	4	4	3	22	3,67
20	4	5	3	2	5	5	24	4,00
21	5	2	2	5	4	2	20	3,33
22	3	3	3	5	5	3	22	3,67
23	2	4	5	3	5	4	23	3,83
24	3	4	2	4	5	4	22	3,67
25	5	5	3	4	4	2	23	3,83
26	2	5	4	3	3	4	21	3,50
27	5	3	4	4	5	3	24	4,00
28	5	4	5	4	3	2	23	3,83
29	4	4	4	3	4	3	22	3,67
30	3	4	3	4	4	4	22	3,67
31	4	4	4	5	4	2	23	3,83
32	5	5	5	5	4	4	28	4,67
33	5	4	5	4	5	5	28	4,67
34	4	4	4	3	4	5	24	4,00
35	3	5	4	4	4	4	24	4,00
JML	143	139	132	135	153	124	826	206,50

S



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo

Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 829976; E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

No.:19147/PIP/LEMLIT-UNISAN/VIII/2021

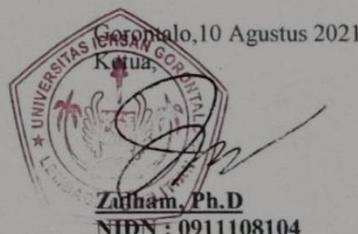
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ihsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan proposal/skripsi, kepada:

Nama Mahasiswa : Fatma Yusuf
NIM : E2119268
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Manajemen
Lokasi Penelitian : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato
Judul penelitian : Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Pohuwato

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN POHuwATO
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. MH. Thamrin Kompleks Blok Pian. Perkantoran Telp. (0443) 210040 Fax. (0443) 210080

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 900/BKD/783/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Fatma Yusuf

Nim : E2119268

Fakultas : Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo

Jurusan : Manajemen

TTL : 01 Oktober 1997

Alamat : Desa Dulomo, Kec. Tilango, Kab. Gorontalo

Benar-benar telah melaksanakan penelitian dengan judul **Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Marisa, 04 November 2021

Mengetahui
An. Kepala BKD Kab. Pohuwato

Sekretaris

SUWARTONO HULAWA, SE
Nip. 197503022000031003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0933/UNISAN-G/S-BP/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : FATMA YUSUF
NIM : E2119268
Program Studi : Manajemen (S1)
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
ANGGARAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH DI
KABUPATEN POHuwato

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 18%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 19 November 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



Fatma Yusuf Revisi.docx

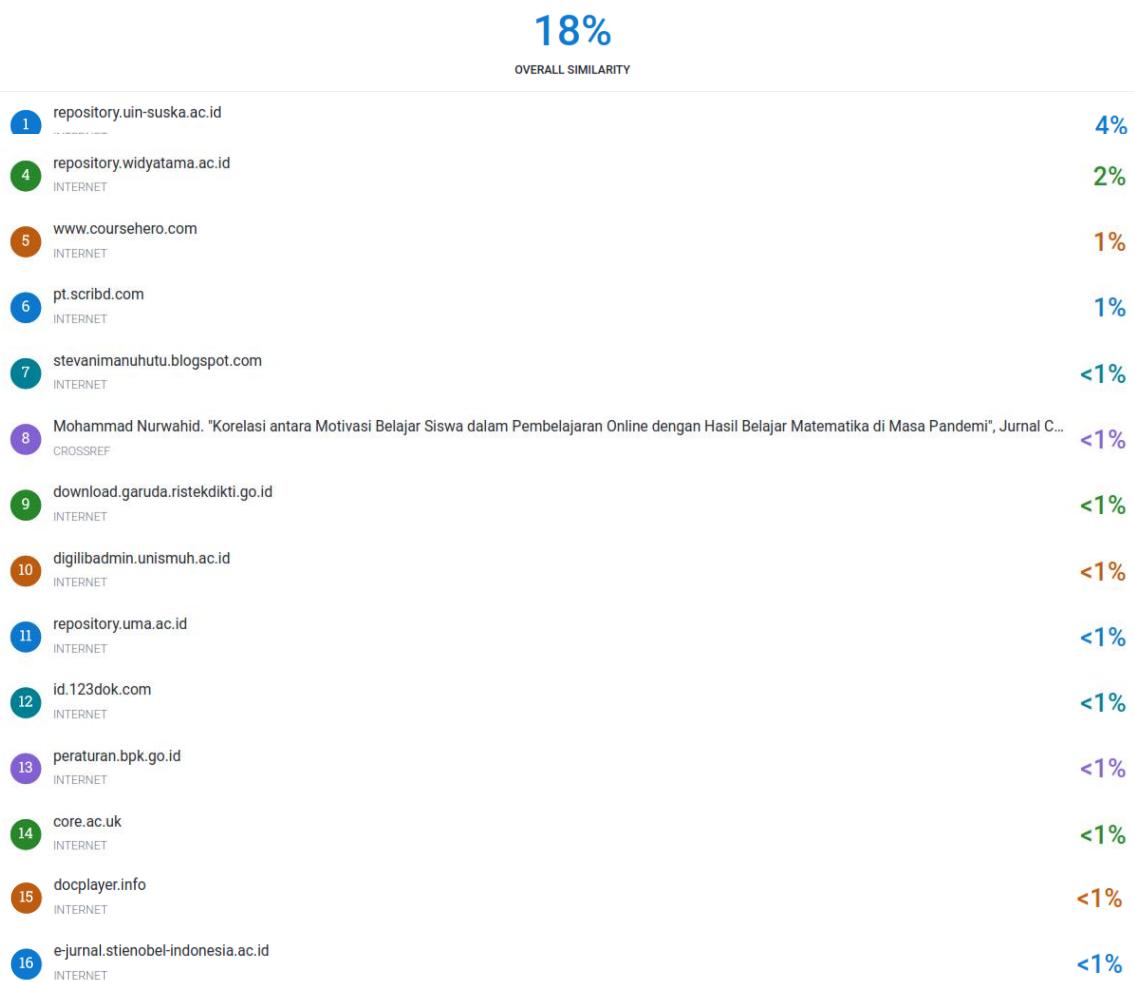
Nov 17, 2021

6933 words / 46407 characters

E21. 19. 268

Skripsi_Fatma Yusuf.docx

Sources Overview



CURICULUM VITAE

1. IdentitasPribadi



Nama	:	Fatma Yusuf
NIM	:	E21.19.268
Tempat/TglLahir	:	Gorontalo, 01 Oktober 1997
JenisKelamin	:	Perempuan
Angkatan	:	2019
Fakultas	:	Ekonomi
Jurusan	:	Manajemen
Konsentrasi	:	Manajemen Keuangan
Agama	:	Islam
Alamat	:	Desa Dulomo, Tilango

2. RiwayatPendidikan

1. Tamat di SDN 9 TILANGO Tahun : 2009
2. Tamat SMP MUHAMMADIYAH TILANGO Tahun : 2012
3. Tamat SMK NEGERI 1 GORONTALO Tahun : 2015
4. Melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Ichsan Gorontalo, mengambil Jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi sampai sekarang.